



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan...

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 015);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 004);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 016);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 20).

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berubah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp.1.499.957.162.028,00
2. Bertambah Rp. 155.994.037.856,44
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp.1.655.951.199.884,44 ✓

b. Belanja

1. Semula Rp.1.528.147.121.328,00
2. Bertambah Rp. 298.097.193.760,81 ✓
- Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp.1.826.244.315.088,81
- Surplus /(Defisit)setelah Perubahan
Rp. (170.293.115.204,37)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

- a. Semula Rp. 47.456.813.031,00 ✓
- b. Bertambah Rp.144.965.303.125,00 ✓
- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp.192.422.116.156,00 ✓

2. Pengeluaran

- a. Semula Rp.19.266.853.731,00 ✓
- b. Bertambah Rp. 2.862.147.220,63 ✓
- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.22.129.000.951,63 ✓

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan

Rp.170.293.115.204,37

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 39.341.824.019,95 ✓

2. Bertambah Rp. 14.928.448.212,57 ✓

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

Perubahan Rp.54.270.272.232,52 ✓

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 1.213.803.124.756,23 ✓

2. Bertambah Rp. 83.167.149.995,69 ✓

Jumlah dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp.1.296.970.274.751,92 ✓

c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula Rp.246.812.213.251,82 ✓

2. Bertambah Rp. 57.898.439.648,18 ✓

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan Rp.304.710.652.900,00 ✓

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 10.342.473.419,95 ✓

2. Bertambah Rp. 8.710.581.703,15

Jumlah Pajak daerah yang sah setelah Perubahan

Rp.19.053.055.123,10 ✓

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 20.549.821.500,00 ✓

2. Bertambah Rp. 7.279.287.400,00 ✓

Jumlah Retribusi daerah yang sah setelah Perubahan

Rp.27.829.108.900,00 ✓

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp.817.451.610,00 ✓

2. Bertambah Rp.0

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

Dipisahkan setelah Perubahan Rp.817.451.610,00

d. Lain-lain...

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp.7.632.077.490,00 ✓

2. Berkurang Rp.1.061.420.890,58 ✓

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Setelah Perubahan Rp.6.570.656.599,42 ✓

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

1. Semula Rp.294.148.329.756,23 ✓

2. Bertambah Rp. 83.167.149.995,69

Jumlah Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

setelah Perubahan Rp.377.315.479.751,92 ✓

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 772.464.315.000,00 ✓

2. Bertambah Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

Rp.772.464.315.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp.147.190.480.000,00 ✓

2. Bertambah Rp.0

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp.147.190.480.000,00

(4) Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1. Semula Rp. 29.851.319.379,82 ✓

2. Berkurang Rp. 1.139.404.979,82 ✓

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan

Rp.28.711.914.400,00 ✓

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 190.222.734.400,00 ✓

2. Berkurang Rp. 19.833.344.900,00 ✓

Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah

Perubahan Rp.170.389.389.500,00 ✓

c. Bantuan...

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah

lainnya.

1. Semula Rp.26.738.159.472,00 ✓

2. Bertambah Rp.78.871.189.528,00 ✓

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan

Rp.105.609.349.000,00 ✓

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 731.022.236.713,00 ✓

2. Berkurang Rp. 10.571.960.647,64

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp.720.450.276.065,36

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp.797.124.884.615,00 ✓

2. Bertambah Rp.308.669.154.408,45 ✓

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp.1.105.794.039.023,45 ✓

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp.607.163.411.293,00

2. Berkurang Rp. 3.491.576.961,64

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp.603.671.834.331,36

Belanja Pegawai termasuk insentif pajak, insentif retribusi dan upah pungut, dan belanja pegawai lainnya.

b. Belanja Hibah

1. Semula Rp.76.492.041.565,00

2. Bertambah Rp. 5.883.630.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp.82.375.671.565,00

c. Belanja...

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp.4.233.650.000,00

2. Bertambah Rp. 541.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp.4.774.650.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 29.343.760.000,00

2. Bertambah Rp.0

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan

Rp.29.343.760.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp.13.789.373.855,00

2. Berkurang Rp. 13.505.013.686,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp.284.360.169,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp.42.797.805.000,00

2. Bertambah Rp. 5.668.090.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 48.465.895.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp.388.593.501.612,00

2. Bertambah Rp. 63.524.301.288,45

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp. 452.117.802.900,45

c. Belanja Modal

1. Semula Rp.365.733.578.003,00

2. Bertambah Rp.239.476.763.120,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 605.210.341.123,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan...

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 47.456.813.031,00

2. Bertambah Rp. 144.965.303.125,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 192.422.116.156,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp. 19.266.853.731,00

2. Bertambah Rp. 2.862.147.220,63

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 22.129.000.951,63

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1. Semula Rp. 47.456.813.031,00

2. Bertambah Rp. 144.965.303.125,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 192.422.116.156,00

b. Estimasi Silpa Tahun Berjalan

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah Rp. 0

Jumlah Estimasi Silpa Tahun Berjalan setelah Perubahan

Rp. 0

c. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah Rp. 0

Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan

Rp. 0

d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah Rp. 0

Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 0

Estimasi Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah Rp. 0

Jumlah Estimasi Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0

e. Penerimaan...

e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman

1. Semula Rp.0

2. Bertambah Rp.0

f. Penerimaan piutang daerah

1. Semula Rp.0

2. Bertambah Rp.0

Jumlah penerimaan Piutang daerah setelah perubahan Rp.0

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana Cadangan

1. Semula Rp.0

2. Bertambah Rp.0

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.0

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp.5.000.000.000,00

2. Bertambah Rp.0

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Perubahan Rp.5.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula Rp.14.266.853.731,00

2. Bertambah Rp. 2.862.147.220,63

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 17.129.000.951,63

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp.0

2. Bertambah Rp.0

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1.Lampiran...

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum selesai dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

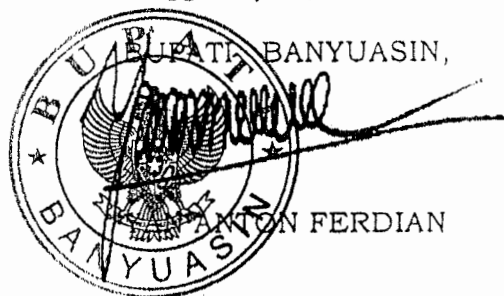
Pasal 7...

Pasal 7

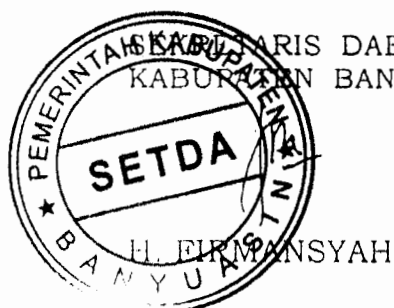
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal **1 NOVEMBER** 2013



Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal **1 NOVEMBER** 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013
NOMOR 72



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWASI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor : 2


Tanggal : 1 November 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
1	2				
1	PENDAPATAN	1.499.957.162.028,00	1.655.951.199.884,44	155.994.037.856,44	10,40
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.341.824.019,95	54.270.272.232,52	14.928.448.212,57	37,95
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.342.473.419,95	19.053.055.123,10	8.710.581.703,15	84,22
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	20.549.821.500,00	27.829.108.900,00	7.279.287.400,00	35,42
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	817.451.610,00	817.451.610,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.632.077.490,00	6.570.656.599,42	(1.061.420.890,58)	(13,91)
1.1.1.4					
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.213.803.124.756,23	1.296.970.274.751,92	83.167.149.995,69	6,85
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	294.148.329.756,23	377.315.479.751,92	83.167.149.995,69	28,27
1.2.2	Dana Alokasi Umum	772.464.315.000,00	772.464.315.000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Alokasi Khusus	147.190.480.000,00	147.190.480.000,00	0,00	0,00
1.2.3		246.812.213.251,82	304.710.652.900,00	57.898.439.648,18	23,46
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.851.319.379,82	28.711.914.400,00	(1.139.404.979,82)	(3,82)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	190.222.734.400,00	170.389.389.500,00	(19.833.344.900,00)	(10,43)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.738.159.472,00	105.609.349.000,00	78.871.189.528,00	294,98
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
2	BELANJA	1.528.147.121.328,00	1.826.244.315.088,81	298.097.193.760,81	19,51
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	731.022.236.713,00	720.450.276.065,36	(10.571.960.647,64)	(1,45)
2.1.1	Belanja Pegawai	607.163.411.293,00	603.671.834.331,36	(3.491.576.961,64)	(0,58)
2.1.1.1	Belanja Hibah	76.492.041.565,00	82.375.671.565,00	5.883.630.000,00	7,69
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.233.650.000,00	4.774.650.000,00	541.000.000,00	12,78
2.1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	29.343.760.000,00	29.343.760.000,00	0,00	0,00
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	13.789.373.855,00	284.360.169,00	(13.505.013.686,00)	(97,94)
2.1.1.8		797.124.884.615,00	1.105.794.039.023,45	308.669.154.408,45	38,72
2.2	BELANJA LANGSUNG				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Pegawai	42.797.805.000,00	48.465.895.000,00	5.668.090.000,00	13,24
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	388.593.501.612,00	452.117.802.900,45	63.524.301.288,45	16,35
2.2.3	Belanja Modal	365.733.578.003,00	605.210.341.123,00	239.476.763.120,00	65,48
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.189.959.300,00)	(170.293.115.204,37)	(142.103.155.904,37)	504,09
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47.456.813.031,00	192.422.116.156,00	144.965.303.125,00	305,47
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.266.853.731,00	22.129.000.951,63	2.862.147.220,63	14,86
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	14.266.853.731,00	17.129.000.951,63	2.862.147.220,63	20,06
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	28.189.959.300,00	170.293.115.204,37	142.103.155.904,37	504,09
		0,00	0,00	0,00	0,00

Pangkalan Balai, 1 November 2013

BUPATI KABUPATEN BANYUASIN

 **ANTON FERDIAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran IIa Peraturan Daerah
Nomor 2
Tanggal 1 November 2013

PENDAPATAN														
KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	TOTAL LANGSUNG		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Rp	Rp	Rp	%		Rp	Rp	Jumlah Belanja	Rp	Rp	Jumlah Belanja		Rp
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14	
1.01.01	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	392.897.407.197,00	174.316.767.827,00	567.214.175.024,00	386.899.342.370,01	755.206.767.827,00	642.102.110.197,01	74.887.935.173,01	13,20	
1.01	Unsur Wajib Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	392.897.407.197,00	174.316.767.827,00	567.214.175.024,00	386.899.342.370,01	755.206.767.827,00	642.102.110.197,01	74.887.935.173,01	13,20	
1.02.01	Dinas Kesehatan	9.690.343.000,00	15.437.715.600,00	5.747.372.600,00	59,31	40.456.966.185,00	49.972.245.976,00	90.429.212.161,00	41.051.991.184,95	61.295.601.799,45	102.347.592.984,40	11.918.380.823,40	13,18	
1.02	Unsur Wajib Kesehatan	9.690.343.000,00	15.437.715.600,00	5.747.372.600,00	59,31	40.456.966.185,00	49.972.245.976,00	90.429.212.161,00	41.051.991.184,95	61.295.601.799,45	102.347.592.984,40	11.918.380.823,40	13,18	
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	1.300.000.000,00	2.826.414.800,00	1.526.414.800,00	117,42	5.090.092.520,00	11.071.929.800,00	16.162.022.320,00	5.267.554.420,00	15.452.344.600,00	20.719.899.020,00	4.557.876.700,00	28,20	
1.02	Unsur Wajib Kesehatan	1.300.000.000,00	2.826.414.800,00	1.526.414.800,00	117,42	5.090.092.520,00	11.071.929.800,00	16.162.022.320,00	5.267.554.420,00	15.452.344.600,00	20.719.899.020,00	4.557.876.700,00	28,20	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.772.632,00	36.062.728.418,00	98.749.501.050,00	2.686.772.632,00	142.477.728.418,00	145.164.501.050,00	46.415.000.000,00	47,00	
1.03	Unsur Wajib Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.772.632,00	36.062.728.418,00	98.749.501.050,00	2.686.772.632,00	142.477.728.418,00	145.164.501.050,00	46.415.000.000,00	47,00	
1.05	Unsur Wajib Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.994.468,00	101.572.166.664,00	104.505.161.132,00	2.667.394.468,00	191.642.766.664,00	194.310.161.132,00	89.805.000.000,00	85,93	
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.994.468,00	101.572.166.664,00	104.505.161.132,00	2.667.394.468,00	191.642.766.664,00	194.310.161.132,00	89.805.000.000,00	85,93	
1.03	Unsur Wajib Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.994.468,00	101.572.166.664,00	104.505.161.132,00	2.667.394.468,00	191.642.766.664,00	194.310.161.132,00	89.805.000.000,00	85,93	
1.03.03	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.996.179,00	24.878.071.000,00	26.802.067.179,00	1.923.996.179,00	35.728.071.000,00	37.652.067.179,00	10.840.000.000,00	40,48	
1.03	Unsur Wajib Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.996.179,00	24.878.071.000,00	26.802.067.179,00	1.923.996.179,00	35.728.071.000,00	37.652.067.179,00	10.840.000.000,00	40,48	
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.036.272,00	9.614.433.700,00	13.178.489.972,00	4.384.004.272,00	11.294.485.700,00	15.678.489.972,00	2.500.000.000,00	18,97	
1.06	Unsur Wajib Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.036.272,00	9.614.433.700,00	13.178.489.972,00	4.384.004.272,00	11.294.485.700,00	15.678.489.972,00	2.500.000.000,00	18,97	
1.07.01	Dinas Perencanaan, Komunikasi dan Informatika	4.768.253.000,00	4.768.253.000,00	0,00	0,00	5.706.954.618,00	10.188.594.695,00	15.893.545.313,00	5.706.954.618,00	15.889.057.295,00	21.598.611.911,00	5.700.466.600,00	35,86	
1.07	Unsur Wajib Perencanaan	4.768.253.000,00	4.768.253.000,00	0,00	0,00	5.706.954.618,00	10.188.594.695,00	15.893.545.313,00	5.706.954.618,00	15.889.057.295,00	21.598.611.911,00	5.700.466.600,00	35,86	
1.25	Unsur Wajib Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.124.000,00	1.670.124.000,00	1.670.124.000,00	0,00	5.392.497.667,00	7.228.766.797,00	0,00	0,00	
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.836.269.130,00	5.392.497.667,00	7.228.766.797,00	1.836.269.130,00	5.392.497.667,00	7.228.766.797,00	0,00	0,00	
1.08	Unsur Wajib Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.836.269.130,00	5.392.497.667,00	7.228.766.797,00	1.836.269.130,00	5.392.497.667,00	7.228.766.797,00	0,00	0,00	
1.08.02	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.724.000,00	110.724.000,00	0,00	0,00	2.138.872.043,00	7.885.660.500,00	10.024.532.543,00	2.138.872.043,00	8.785.660.500,00	10.924.532.543,00	900.000.000,00	8,98	
1.08	Unsur Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.724.000,00	110.724.000,00	0,00	0,00	2.138.872.043,00	7.885.660.500,00	10.024.532.543,00	2.138.872.043,00	8.785.660.500,00	10.924.532.543,00	900.000.000,00	8,98	
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	469.514.500,00	469.514.500,00	0,00	0,00	1.724.464.026,00	9.705.948.900,00	11.430.412.926,00	1.654.464.026,00	10.375.948.900,00	12.030.412.926,00	600.000.000,00	5,75	
1.10	Unsur Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil	469.514.500,00	469.514.500,00	0,00	0,00	1.724.464.026,00	9.705.948.900,00	11.430.412.926,00	1.654.464.026,00	10.375.948.900,00	12.030.412.926,00	600.000.000,00	5,75	
1.12.01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.872.043,00	7.885.660.500,00	10.024.532.543,00	2.138.872.043,00	8.785.660.500,00	10.924.532.543,00	900.000.000,00	8,98	
1.12	Unsur Wajib Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.872.043,00	7.885.660.500,00	10.024.532.543,00	2.138.872.043,00	8.785.660.500,00	10.924.532.543,00	900.000.000,00	8,98	
1.13.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.883.083,00	6.899.909.843,00	9.109.792.926,00	2.209.883.083,00	6.899.909.843,00	9.109.792.926,00	0,00	0,00	
1.13	Unsur Wajib Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.883.083,00	6.899.909.843,00	9.109.792.926,00	2.209.883.083,00	6.899.909.843,00	9.109.792.926,00	0,00	0,00	
1.14.01	Unsur Wajib Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.883.083,00	6.899.909.843,00	9.109.792.926,00	2.209.883.083,00	6.899.909.843,00	9.109.792.926,00	0,00	0,00	

Uraian, keterangan, dan catatan lain yang relevan dengan perubahan anggaran

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA										BERTAMBAH / (BERBURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERBURANG)	%	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					
						TIDAK LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14			
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788.986.323,00	9.743.733.171,00	13.532.519.494,00	3.753.986.323,00	9.778.733.171,00	13.532.319.494,00	0,00	0,00			
1.14	Unsur Wajib Kewajiban	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788.986.323,00	9.743.733.171,00	13.532.519.494,00	3.753.986.323,00	9.778.733.171,00	13.532.319.494,00	0,00	0,00			
1.15.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.746.008,00	15.422.893.192,00	17.290.139.200,00	1.867.746.008,00	15.922.893.192,00	17.790.139.200,00	500.000.000,00	2,89			
1.15	Unsur Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.746.008,00	15.422.893.192,00	17.290.139.200,00	1.867.746.008,00	14.361.235.192,00	16.228.301.200,00	3.867.000,00	2,07			
2.06	Unsur Pilihan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.960.000,00	605.960.000,00	0,00	665.545.000,00	99.585.000,00	9.83	9,83			
2.07	Unsur Pilihan Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.537.000,00	784.537.000,00	0,00	886.091.000,00	886.091.000,00	111.554.000,00	14,42			
1.19.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	17.129.000,00	17.629.000,00	500.000,00	2,92	2.139.947.800,00	12.660.533.700,00	14.800.481.500,00	2.477.226.880,00	21.894.154.620,00	24.371.481.500,00	9.571.000.000,00	64,67			
1.19	Unsur Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	17.129.000,00	17.629.000,00	500.000,00	2,92	2.139.947.800,00	12.660.533.700,00	14.800.481.500,00	2.477.226.880,00	21.894.154.620,00	24.371.481.500,00	9.571.000.000,00	64,67			
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.452.119,00	3.230.343.637,00	4.783.795.756,00	1.553.452.119,00	3.795.343.637,00	5.348.795.756,00	565.000.000,00	11,81			
1.19	Unsur Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.452.119,00	3.230.343.637,00	4.783.795.756,00	1.553.452.119,00	3.795.343.637,00	5.348.795.756,00	565.000.000,00	11,81			
1.20.01	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206.839.526,00	0,00	11.206.839.526,00	10.400.779.012,00	0,00	10.400.779.012,00	(806.060.514,00)	(7,19)			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206.839.526,00	0,00	11.206.839.526,00	10.400.779.012,00	0,00	10.400.779.012,00	(806.060.514,00)	(7,19)			
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	913.354.000,00	0,00	913.354.000,00	913.354.000,00	0,00	913.354.000,00	0,00	0,00			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Sekretaris Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	913.354.000,00	0,00	913.354.000,00	913.354.000,00	0,00	913.354.000,00	0,00	0,00			
1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985.062.979,00	55.513.505.490,00	75.498.568.429,00	18.742.210.273,00	66.012.312.351,00	84.754.522.624,00	9.255.954.155,00	12,76			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Sekretaris Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985.062.979,00	55.513.505.490,00	75.498.568.429,00	18.742.210.273,00	62.254.844.351,00	80.997.054.624,00	8.142.294.195,00	11,18			
1.20.04	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Sekretaris Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985.062.979,00	55.513.505.490,00	75.498.568.429,00	18.742.210.273,00	62.254.844.351,00	80.997.054.624,00	8.142.294.195,00	11,18			
1.20.05	Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.453.425,00	35.277.883.599,00	39.116.337.024,00	3.512.328.425,00	53.104.008.599,00	56.616.337.024,00	17.500.000.000,00	44,74			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.453.425,00	35.277.883.599,00	39.116.337.024,00	3.512.328.425,00	53.104.008.599,00	56.616.337.024,00	17.500.000.000,00	44,74			
1.20.06	Badan Kependidikan dan Diklat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.757.150,00	6.551.485.398,00	11.307.242.548,00	4.755.757.150,00	10.328.808.304,00	14.607.242.548,00	3.300.000.000,00	29,18			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Badan Kependidikan dan Diklat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.757.150,00	6.551.485.398,00	11.307.242.548,00	4.755.757.150,00	10.328.808.304,00	14.607.242.548,00	3.300.000.000,00	29,18			
1.20.07	Badan Pertahanan Terpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.547.595,00	3.699.220.655,00	6.141.768.250,00	2.442.547.595,00	2.740.773.519,00	6.591.768.250,00	450.000.000,00	7,33			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Badan Pertahanan Terpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.547.595,00	3.699.220.655,00	6.141.768.250,00	2.442.547.595,00	2.740.773.519,00	6.591.768.250,00	450.000.000,00	7,33			
1.20.08	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.479.112.047.528,00	1.627.831.797.984,44	148.719.750.456,44	10,05	138.721.243.826,00	15.656.715.100,00	154.377.958.926,00	134.932.381.552,40	17.351.187.900,00	152.283.569.452,40	(2.094.389.473,60)	(1,36)			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.479.112.047.528,00	1.627.831.797.984,44	148.719.750.456,44	10,05	138.721.243.826,00	15.656.715.100,00	154.377.958.926,00	134.932.381.552,40	17.351.187.900,00	152.283.569.452,40	(2.094.389.473,60)	(1,36)			
1.20.09	Kecamatan Banyuwangi I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.10	Kecamatan Banyuwangi II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.11	Kecamatan Banyuwangi III	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi III	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.12	Kecamatan Banyuwangi IV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi IV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.13	Kecamatan Banyuwangi V	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi V	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.14	Kecamatan Banyuwangi VI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi VI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.15	Kecamatan Banyuwangi VII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi VII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.16	Kecamatan Banyuwangi VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.17	Kecamatan Banyuwangi IX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi IX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.18	Kecamatan Banyuwangi X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.19	Kecamatan Banyuwangi XI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi XI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.20	Kecamatan Banyuwangi XII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20	Unsur Wajib Daerah, Pemerintahan Umum, Kecamatan Banyuwangi XII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.510.414,00	381.260.930,00	3.343.771.344,00	2.962.510.414,00	481.260.930,00	3.443.771.344,00	100.000.000,00	2,99			
1.20.21	Kecamatan Banyuwangi XIII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.96										

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA				BERTAMBAH / (BERKURANG)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG			LANGSUNG	JUMLAH BELANJA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																								3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN					BELANJA										Bertambah / (Berkurang)
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / (Berkurang)	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					
		Rp	%	Rp	%		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	Jumlah Belanja	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	Jumlah Belanja					
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14				
2.01	Usulan Pembiayaan	5.745.000,00	5.745.000,00	0,00	0,00	+992.650.387,00	20.381.601.417,00	25.374.251.804,00	4.992.650.387,00	21.256.561.417,00	26.349.211.804,00	4.992.650.387,00	2,45				
2.01.02	Bantuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Perlindungan dan Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.729.698,00	9.661.269.000,00	20.616.998.698,00	10.262.549.996,00	10.354.448.702,00	20.616.998.698,00	0,00	0,00				
2.01.02.1	Usulan Pembiayaan Perlindungan dan Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.729.698,00	9.661.269.000,00	20.616.998.698,00	10.262.549.996,00	10.354.448.702,00	20.616.998.698,00	0,00	0,00				
2.02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.195.065,00	13.100.672.970,00	18.273.868.035,00	4.866.728.862,00	13.407.139.173,00	18.273.868.035,00	0,00	0,00				
2.02.01	Usulan Pembiayaan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.195.065,00	13.100.672.970,00	18.273.868.035,00	4.866.728.862,00	13.407.139.173,00	18.273.868.035,00	0,00	0,00				
2.03	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.320.613,00	8.898.974.350,00	11.694.294.963,00	2.795.320.613,00	10.038.974.350,00	12.834.294.963,00	1.140.000.000,00	9,75				
2.03.01	Usulan Pembiayaan Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.320.613,00	8.898.974.350,00	11.694.294.963,00	2.795.320.613,00	10.038.974.350,00	12.834.294.963,00	1.140.000.000,00	9,75				
2.04.01	Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.114.384,00	4.051.756.117,00	5.530.870.501,00	1.544.114.384,00	6.716.756.117,00	8.260.870.501,00	2.730.000.000,00	49,96				
1.17	Usulan Wajib Kelodayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000.000,00	1.206.000.000,00	0,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	105.000.000,00	25,29				
1.18	Usulan Wajib Kelodayaan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.000.000,00	1.438.000.000,00	0,00	3.100.150.000,00	3.100.150.000,00	1.662.150.000,00	115,59				
2.04	Usulan Pembiayaan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.114.384,00	4.051.756.117,00	5.530.870.501,00	1.544.114.384,00	2.035.606.117,00	3.649.720.501,00	762.850.000,00	26,42				
2.05.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	280.650.000,00	280.650.000,00	0,00	0,00	2.375.287.846,00	9.812.974.300,00	12.188.262.146,00	2.202.122.986,00	10.136.139.160,00	12.338.262.146,00	150.000.000,00	1,23				
2.05	Usulan Pembiayaan Kelautan dan Perikanan	280.650.000,00	280.650.000,00	0,00	0,00	2.375.287.846,00	9.812.974.300,00	12.188.262.146,00	2.202.122.986,00	10.136.139.160,00	12.338.262.146,00	150.000.000,00	1,23				
2.06.01	Dinas Perdagangan Pasar	1.313.220.000,00	1.313.220.000,00	0,00	0,00	2.114.144.065,00	5.132.579.782,00	7.246.723.847,00	2.244.144.065,00	5.207.579.782,00	7.451.723.847,00	205.000.000,00	2,83				
2.06	Usulan Pembiayaan Perdagangan	1.313.220.000,00	1.313.220.000,00	0,00	0,00	2.114.144.065,00	5.132.579.782,00	7.246.723.847,00	2.244.144.065,00	5.207.579.782,00	7.451.723.847,00	205.000.000,00	2,83				
JUMLAH		1.399.957.162.028,00	1.655.951.199.884,44	155.994.037.856,44	10,40	731.022.236.713,00	797.124.884.615,00	1.528.147.121.328,00	720.450.276.065,36	1.105.294.039.023,45	1.826.244.315.088,81	298.097.193.760,81	19,51				

